

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk melebihi 270 juta orang, menduduki peringkat keempat dalam daftar negara dengan populasi terbesar di dunia, berada setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat (Annur, 2023). Sebagai negara berkembang dengan populasi yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan bonus demografi. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, Selama bonus demografi, usia produktif Indonesia lebih besar daripada usia non-produktif (15-64 tahun). Fenomena bonus demografi yang tengah dialami oleh Indonesia memberikan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan inovasi, serta penguatan daya saing di tingkat global. Akan tetapi, di balik potensi besar tersebut, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan serius, seperti tingginya tingkat pengangguran, tekanan terhadap sistem pendidikan, serta semakin tajamnya kesenjangan sosial dan ekonomi.

Menurut Mankiw (2022), pengangguran didefinisikan sebagai kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam hal ini, seseorang dianggap menganggur jika mereka tidak bekerja, namun secara aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja jika mendapatkan kesempatan. Pengangguran ini mencerminkan ketidaksesuaian antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah individu yang mencari pekerjaan, serta dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi yang luas. Kondisi ini juga dapat berkontribusi pada terjadinya pengangguran terdidik, yaitu situasi di mana individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terdidik merujuk pada individu yang tidak memiliki pekerjaan atau aktif dalam mencari pekerjaan, dengan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA atau sederajat (Rahmah et al., 2023).

**Tabel 1. 1 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Orang)**

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang Ditamatkan (Orang)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SMA	1.945.826	2.008.035	2.662.444	2.472.859	2.478.173	2.514.481
SMK	1.752.241	1.739.625	2.326.599	2.111.338	1.661.492	1.780.095
Diploma	223.456	218.954	305.261	216.024	159.490	171.897
Universitas	740.370	746.354	981.203	848.657	673.485	787.973
<b>Total</b>	<b>3.995.560</b>	<b>4.712.968</b>	<b>6.275.507</b>	<b>5.648.878</b>	<b>4.829.099</b>	<b>5.254.446</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, jumlah pengangguran terbuka dengan latar belakang pendidikan menengah, terutama lulusan SMA dan SMK, konsisten mendominasi. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran lulusan SMA tercatat sebesar 2.514.481 orang dan SMK sebesar 1.780.095 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan menengah belum berhasil menyiapkan lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Sobari et al. (2023) yang menyatakan bahwa rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya, terjadi mismatch antara keterampilan lulusan dan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan SMA dan SMK rentan menjadi penganggur meskipun mereka seharusnya disiapkan sebagai tenaga kerja siap pakai.

Lulusan pendidikan tinggi seperti diploma dan universitas juga tidak lepas dari masalah pengangguran. Pada tahun 2023, pengangguran dari lulusan universitas mencapai 787.973 orang dan lulusan diploma sebesar 171.897 orang. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan lulusan SMA dan SMK, angka ini tetap signifikan dan menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam penyesuaian antara output pendidikan tinggi dan dunia kerja. (Pratama & Setyowati, 2022) menekankan bahwa fokus pendidikan tinggi yang terlalu teoritis tanpa memperkuat kompetensi praktis menjadi salah satu penyebab utama.

Akibatnya, lulusan pendidikan tinggi tidak hanya sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, tetapi juga berpotensi menjadi penganggur terselubung.

Berdasarkan berbagai studi literatur yang telah ditelaah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diidentifikasi sebagai salah satu indikator signifikan yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik. Menurut Rozaini & Sinaga (2023) bahwa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran terdidik. Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (2020), pada tahun 1990, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Indeks ini dirancang guna menegaskan peran sentral manusia serta potensi sumber daya yang dimilikinya dalam proses pembangunan. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu tingkat pendidikan atau pengetahuan, derajat kesehatan dan harapan hidup, serta standar hidup yang layak.

Berdasarkan data dari (Badan Pusat Statistik, 2024b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara konsisten sepanjang periode tahun 2018 hingga 2023. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2018 dilaporkan sebesar 71,39. Nilai tersebut meningkat menjadi 71,92 pada tahun 2019 dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 71,94 pada tahun 2020. Meskipun pada tahun 2020 dunia dilanda pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan besar terhadap berbagai sektor pembangunan, Indonesia tetap mampu mempertahankan dan meningkatkan angka IPM. Pada tahun 2021, IPM tercatat sebesar 72,29 dan terus mengalami pertumbuhan menjadi 72,91 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, IPM Indonesia mencapai 73,55, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode yang diamati.

Peningkatan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan yang relatif stabil setiap tahun menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan adanya ketahanan pembangunan manusia Indonesia terhadap

berbagai tantangan eksternal, seperti pandemi global. Dengan demikian, peningkatan IPM selama periode ini menjadi indikator penting bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan menuju tingkat yang lebih baik.

Selain faktor Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi juga menjadi variabel penting yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik (Safitri & Endang, 2024). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi nasional, yang pada gilirannya mendorong terciptanya lapangan kerja baru di berbagai sektor. Dengan bertambahnya lapangan kerja, peluang bagi tenaga kerja terdidik untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka pun semakin besar. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi melambat, penciptaan lapangan kerja akan terhambat, sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, termasuk pengangguran di kalangan tenaga kerja terdidik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik sepanjang periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018 dan 2019, ekonomi nasional tumbuh stabil masing-masing sebesar 5,17% dan 5,02%, mencerminkan kondisi makroekonomi yang cukup kuat. Namun, pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di sektor industri, pariwisata, dan perdagangan (Susilawati et al., 2020). Meski demikian, tahun-tahun berikutnya menunjukkan pemulihan yang bertahap. Pada 2021, perekonomian tumbuh 3,70% dan terus meningkat menjadi 5,31% pada 2022 serta tetap kuat di angka 5,05% pada 2023. Pemulihan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, seperti bantuan sosial, insentif bagi UMKM, serta penguatan pelayanan kesehatan (Ananda et al., 2025). Selain itu, sinergi antara sektor publik dan swasta juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi guncangan global serta efektivitas strategi pemulihan yang diterapkan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara atau daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, yang berpotensi menciptakan lebih banyak

lapangan pekerjaan. Peningkatan aktivitas ekonomi ini tidak hanya mencerminkan kemajuan ekonomi, tetapi juga berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Ketika sektor-sektor ekonomi berkembang, permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, sehingga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Endang (2024) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak negatif signifikan dalam mengurangi pengangguran terdidik yang mana artinya bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan menurunkan pengangguran terdidik.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pengangguran terdidik adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), sebagaimana yang diungkapkan oleh (Rosalina et al., 2018). Menurut Pasal 26 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan standar upah minimum yang ditetapkan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota dalam suatu provinsi. Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting, antara lain kebutuhan hidup layak, tingkat produktivitas, serta dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan setiap tahun oleh gubernur melalui keputusan resmi setelah mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi. UMP berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari upah yang tidak layak, mengurangi ketimpangan pendapatan antar wilayah, serta mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi di seluruh Indonesia. Penetapan UMP mempertimbangkan berbagai indikator makroekonomi, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan daya serap tenaga kerja.

Setiap provinsi memiliki besaran UMP yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi ekonomi, tingkat biaya hidup, dan produktivitas daerah masing-masing. Misalnya, provinsi dengan biaya hidup tinggi seperti DKI Jakarta menetapkan UMP yang jauh lebih besar dibandingkan dengan provinsi di kawasan Indonesia Timur. Perbedaan UMP ini mencerminkan ketidakmerataan pembangunan dan kapasitas ekonomi antar wilayah. Selain itu, ketentuan UMP juga berpotensi mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja, termasuk diantaranya tingkat pengangguran terdidik.

UMP yang terlalu rendah dapat menyebabkan penurunan daya tarik angkatan kerja berpendidikan tinggi terhadap pasar kerja lokal, sementara UMP yang terlalu tinggi dapat menekan kemampuan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja baru.

Melihat kondisi tersebut, penting untuk segera menaruh perhatian pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Bonus demografi yang tengah berlangsung seharusnya menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja yang seimbang dengan kualitas tenaga kerja, peluang ini justru dapat berubah menjadi ancaman. Meskipun IPM Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat ketimpangan antara capaian pendidikan dan serapan tenaga kerja, yang mengakibatkan banyak lulusan berpendidikan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan penetapan UMP yang tidak merata antar provinsi juga memperbesar tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan realitas ini, penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap pengangguran terdidik menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara ketiga faktor tersebut, tetapi juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam menyusun strategi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang dinamis. Jadi, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap pengangguran terdidik di Indonesia”** berdasarkan uraian masalah di atas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah dijabarkan, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini disampaikan seperti yang tertera di bawah ini:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 2018-2023?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 2018-2023?

3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 2018-2023?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji sejauh mana kontribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik di Indonesia selama kurun waktu 2018 hingga 2023.
2. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia pada tahun 2018-2023.
3. Meneliti hubungan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan pengangguran terdidik di Indonesia dalam rentang waktu 2018-2023.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.) Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data tambahan untuk membantu ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, *output* penelitian ini juga diharapkan bisa berkontribusi sebagai referensi ilmiah tambahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

b.) Manfaat Praktis

1. Temuan penelitian ini dengan harapan menjadi dasar pertimbangan untuk instansi pemerintah dalam evaluasi kebijakan pengangguran terdidik.
2. Temuan penelitian ini dengan harapan meningkatkan ilmu dan perspektif peneliti terkait objek yang diteliti.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menganalisis dampak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi terhadap pengangguran terdidik di Indonesia pada periode 2018-2023. Dalam studi ini, IPM, pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Provinsi berperan sebagai variabel independen,

sementara variabel dependen adalah tingkat pengangguran terdidik berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

Tulisan ini dibagi menjadi lima bab yang terstruktur dengan urutan yang terorganisir, dengan uraian rinci lebih lanjut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini akan menguraikan secara rinci isi keseluruhan penelitian, dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian, diikuti oleh perumusan masalah, tujuan hingga manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian yang membahas tinjauan pustaka ini, akan dibahas mengenai rangkuman literatur yang relevan dalam bidang pengetahuan. Tinjauan pustaka juga berfungsi sebagai acuan penelitian, yang mencakup landasan teori, hubungan antar variabel, studi sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis yang diajukan dalam kajian ini.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian metodologi penelitian, akan dijelaskan jenis penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data hingga teknik analisis data, serta definisi operasional.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian yang membahas pembahasan ini, akan menyajikan dan menginterpretasikan hasil dari pengujian serta menampilkan hasil statistik penelitian untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Penjelasan akan mencakup analisis data yang diperoleh melalui berbagai metode statistik yang digunakan, serta interpretasi dari hasil-hasil tersebut, untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang diangkat dalam kajian ini.

## **BAB V: PENUTUP**

Bagian penutup, akan diuraikan temuan yang didapatkan dari kajian ini, disampaikan melalui pernyataan-pernyataan yang kritis dan argumentatif. Setiap pernyataan akan dikaitkan secara langsung dengan tujuan utama dari penelitian ini, dengan memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh mengenai temuan temuan yang ada.

